

Paradoks Penanganan Stunting: Studi Kasus Lonjakan Angka Stunting di Kecamatan Mendo Barat di Tengah Rekognisi Keberhasilan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka

Muhammad Badawi Almuarrof^{a,1}, Rangga Juwanda Sapitra^{b,2}, Alif Rizki Wahyudi^{c,3}, Eko Saputra^{d,4}, Irvan Ansary^{e,5*}

^{a,b,c,d,e}Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka and 33172, Indonesia

¹baadaawii.445@gmail.com; ²ranggadeko234@gmail.com; ³aliefalie75@gmail.com;

⁴series.superw14@gmail.com; ⁵irvan@ubb.ac.id

*Irvan Ansary

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 19 Agustus 2025

Direvisi: 27 Oktober 2025

Disetujui: 10 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Kata Kunci:

Birokrasi

Stunting

Implementasi Kebijakan

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang paradoks yang terjadi antara Penghargaan-penghargaan penurunan stunting di tingkat lokal dan nasional, dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang terus-menerus menjadi lokus stunting sejak tahun 2019 -2024. Penelitian ini menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* Lipsky (1980). Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu Kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradoks yang terjadi dikarenakan koordinator, petugas lapangan dan masyarakat belum seutuhnya berjalan satu arah akibat keterbatasan sumber daya, hal ini memicu terciptanya praktik diskresi dan mekanisme coping. Kesalahan strategi yang hanya berfokus ke anak-anak yang terdampak stunting, bukan juga berfokus pada pencegahan. Program- program yang dijalankan lebih condong pada penurunan saja. Oleh karena itu dalam kajian ini menimbulkan bentuk ketidakseimbangan antara penghargaan yang didapatkan dengan kondisi lapangan di Kecamatan Mendo Barat. program yang dijalankan lebih bervariasi, dengan hal ini, di Kecamatan Mendo Barat mengalami penafsiran program yang berbeda, hal tersebut berkonsekuensi pada efektivitas program. Dengan demikian arah implementasi kebijakan bukan hanya semata karena pemerintah atau petugas lapangan saja, melainkan juga bagaimana peran masyarakat. Partisipasi masyarakat terkhususnya terdampak stunting hanya sekedar peserta tanpa keterlibatan lebih dalam sebagai aktor dalam permasalahan stunting, contohnya minimnya penerapan GERMAS di kehidupan sehari-hari seperti pola perilaku, pola hidup dan etika piring, hal ini menjadi salah satu poin pada PERBUP No. 56 Tahun 2022.

ABSTRACT

Keywords:

Bureaucracy

Stunting

Policy Implementation

Study examines the paradox between the awards received by Bangka Regency at the local and national levels for stunting reduction and the actual condition in Mendo Barat District, which has continuously been designated as a stunting locus from 2019 to 2024. Research employs Michael Lipsky's (1980) *Street-Level Bureaucracy* theory and uses a qualitative method with a case study approach conducted between 2020 and 2024. Findings indicate that the paradox arises because coordination among coordinators, field officers, and communities has not been fully aligned due to limited resources. These constraints trigger the emergence of *discretionary practices* and *coping mechanisms*. The main strategic error lies in the excessive focus on children already affected by stunting, rather than emphasizing preventive measures. Programs implemented tend to focus on short-term reduction efforts rather than holistic prevention. Consequently, this situation creates an imbalance between the recognition received by the government and the actual field conditions in Mendo Barat District. In addition, program implementation varies across the area, leading to different interpretations at the local level and reducing overall program effectiveness. The direction of policy implementation should not depend solely on the government or field officers, but also on the active role of the community. Community participation, particularly among families affected by stunting, remains passive limited to being program beneficiaries rather than active agents in addressing stunting issues. For example, the low adoption of the *GERMAS* principles in daily life such as hygiene behavior, healthy lifestyles, and dietary ethics illustrates this challenge, as emphasized in PERBUP No. 56 of 2022.



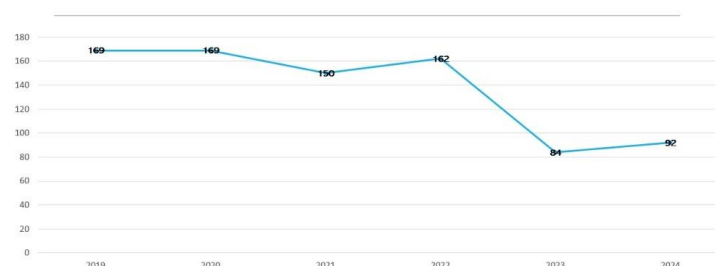
1. Pendahuluan

Berbicara tentang stunting, menurut (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020) adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang kurang gizi baik kronis maupun infeksi berulang, kemudian di tandai dengan tinggi badan yang rendah dari rata-rata usianya. Berdasarkan hasil SKI 2023 dalam (Kemenkes, 2023) bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia tertinggi pada tahun 2013 dengan jumlah sebesar 37,6 % hingga selama 10 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2023 angka prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,5 %. Akan tetapi walaupun adanya penurunan tersebut belum dapat memenuhi target RPJMN 2020 - 2024 yang menargetkan jumlah angka stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Di Indonesia Permasalahan stunting masih terus dibahas hingga saat ini, salah satu faktornya adalah permasalahan gizi yang diakibatkan gangguan kesehatan yang tidak seimbang antara asupan dan kebutuhan hingga berkonsekuensi terhadap kualitas sumber daya manusia. Stunting berkonsekuensi pada perkembangan otak yang mengakibatkan anak-anak kesulitan untuk mengingat, menyelesaikan permasalahan dan kemudian penyebab lainnya seperti asupan gizi ibu, kadar gizi dan riwayat penyakit infeksi. Selanjutnya secara tidak langsungnya disebabkan oleh pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Stunting menjadi permasalahan yang serius yang berkonsekuensi terhadap perkembangan otak yang menyebabkan menurunnya kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan (Rosanti, 2023).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengalami fase fluktuasi dari tahun 2019 sampai 2023, pada 2019 sebesar 19,9% hingga menjadi 18,5% pada 2022, dan mengalami kenaikan cukup signifikan di tahun 2023 dengan jumlah menjadi 20,6% . Kenaikan angka stunting tahun 2023, kabupaten Bangka menjadi penyumbang tertinggi jumlah stunting dari 6 kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka dengan presentasi lumayan tinggi yaitu 23,2% menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi (wowbabel, 2024). Sejak 2023, data dari Agustus hingga Desember 2023 menunjukkan ada 9 desa dengan angka stunting tertinggi yang akan menjadi fokus pada tahun 2024, yang menariknya 7 dari desa dengan angka stunting tertinggi berada di kecamatan Mendo Barat antara lain Kota Kapur, Labuh Air Pandan, Kemuja, Mendo, Paya Benua, Petaling Banjar. Dengan demikian Kecamatan Mendo Barat menjadi lokasi fokus dalam penanganan stunting sejak dari tahun 2019 hingga 2024 (Rania Esdy Prawita, Rendita Dwibarto, 2024).

Gambar 1 Data Stunting Kecamatan Mendo Barat 5 tahun terakhir
DATA KASUS STUNTING KECAMATAN MENDO BARAT
TAHUN 2019 - 2024



SUMBER : aksi.bangka.kemendagri.go.id

Menjawab persoalan ini agar mempercepat angka penurunan stunting, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan PERPRES No 72 Tahun 2021 hingga menjadikan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) yang mencakup terkait tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu Mengurangi hingga menghilangkan semua bentuk kelaparan, bentuk malnutrisi serta meningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2030 dengan melalui penguraian jumlah angka stunting sebesar 40% pada tahun 2025 (Novianti, 2022) serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting difokuskan pada peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan gizi, perbaikan pola pengasuhan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020).

Di tengah Kabupaten Bangka berhasil mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2024 (Yanti, 2024). Kabupaten Bangka Secara berturut dari tahun 2020 sampai 2023 mendapatkan empat kali penghargaan sebagai provinsi konvergensi penurunan angka stunting tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kabupaten Bangka sendiri pernah menjadi salah satu *Best Practice* pengelolaan stunting nasional pada tahun 2021 dan *Best practice* pengelolaan stunting tahun 2019 versi Setwapres (Ahli gizi) (Dinkes.bangka, 2023). Akan tetapi Kecamatan Mendo Barat tiap tahunnya menjadi lokasi penanganan stunting terbanyak serta menjadi penyumbang stunting tertinggi di kabupaten Bangka. adanya upaya pemerintah cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan dengan dibuktikan penurunan yang cukup baik di tahun 2024 (Kemenkes, 2023), tetapi kecamatan mendo barat mengalami peningkatan terutama di sejak tahun 2023 sampai 2025 yang sangat signifikan. Oleh karena itu menimbulkan pertanyaan di era keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Bangka, diwarnai dengan adanya kenaikan angka stunting di Kecamatan Mendo Barat hingga di tetapkan menjadi lokasi utama penanganan stunting di Kabupaten Bangka sejak 2019 – 2025.

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Rania Dkk (2024), yang berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Penurunan Stunting*”. Penelitian tersebut mengkaji bagaimana jalannya implementasi kebijakan penurunan stunting terkhususnya di Kecamatan Mendo Barat dengan melihat aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan berjalannya implementasi kebijakan cukup efektif seperti koordinasi antar pemerintah dan petugas lapangan, program kerja yang sudah cukup berjalan dengan kebijakan. Akan tetapi kondisi di lapangan menghadapi beberapa hambatan dari kurangnya inovasi terbaru, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya kapasitas pelaksanaan dan komitmen. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tersebut menjadi gambaran dasar untuk penelitian ini yang akan dilakukan mengenai jalannya implementasi kebijakan. Akan tetapi penelitian ini melihat lebih kompleks bagaimana pelaksanaan kebijakan dengan melihat langsung bagaimana dinamika yang terjadi baik koordinator, petugas lapangan dan juga masyarakat dengan menggunakan teori Street-Level Bureaucracy (Lipsky, 1980). Dengan demikian penelitian ini mengkaji bagaimana jalannya implementasi kebijakan oleh petugas lapangan yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Bukan hanya itu saja, penelitian ini mengkaji tentang kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang sejak tahun 2019 hingga saat ini terus-menerus menjadi lokus stunting di Kabupaten Bangka, akan tetapi Kabupaten Bangka sendiri beberapa kali berhasil mendapatkan penghargaan penurunan stunting baik tingkat lokal maupun nasional. Jadi penelitian ini juga melihat paradoks antara rekognisi yang di capai oleh Kabupaten Bangka dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat.

Urgensi penelitian ini sangat penting untuk menjawab permasalahan stunting di Kecamatan Mendo Barat yang menjadi lokasi utama penanganan stunting sejak 2019-2025. Hal ini menarik untuk diteliti karena bertolak belakang dengan tren penurunan stunting yang signifikan di Kabupaten Bangka sejak 2024. Padahal, Kabupaten Bangka telah menerima berbagai penghargaan nasional atas pengelolaan stunting, termasuk Best Practice dari

Setwapres. Kesenjangan antara prestasi tersebut dengan tingginya angka stunting di Kecamatan Mendo Barat menimbulkan pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menggali mengapa Kecamatan Mendo Barat terus-terusan menjadi lokus stunting pada periode 2020 - 2024, serta menilai sejauh mana implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kecamatan Mendo Barat?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan konsep *Street-Level Bureaucracy* (SLB) Michael Lipsky (1980) sebagai pisau bedah untuk mengupas secara mendalam polemik permasalahan penanganan stunting yang menimbulkan paradoks antara lonjakan stunting di kecamatan mendo barat dan penghargaan penanganan di Kabupaten Bangka. Dalam hal penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat, teori birokrat jalanan Michael Lipsky sangat relawan digunakan untuk menganalisis paradoks antara lonjakan stunting yang terjadi di Kecamatan Mendo Barat, di satu sisi Kabupaten Bangka mendapatkan beberapa kali penghargaan penanganan stunting berturut-turut. Lipsky menjelaskan bahwa birokrat jalan seperti petugas Kesehatan, kepala desa dan aparaturnya memiliki keterbatasan sumber daya, tekanan target yang tinggi dan hubungan yang kompleks antara penerima layanan dalam proses implementasi kebijakan terkait permasalahan stunting.

Teori *Street-Level Bureaucracy* oleh Michael Lipsky (1980) dalam (Kholifah, 2013) menyatakan bahwa kebijakan terbentuk dan dibentuk kembali dalam interaksi antara birokrat garis depan dan warga. Birokrasi garis depan memiliki diskresi luas, berada di bawah keterbatasan sumber daya, dan mengembangkan mekanisme coping untuk mengelola beban kerja. Dalam topik permasalahan paradoks penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat, pendekatan teori ini memposisikan petugas lapangan pemerintah dalam penanganan stunting sebagai aktor kunci, sudah sejalan dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. Petugas lapangan atau birokrat garis depan, bertugas sebagai orang lapangan yang menjalankan kebijakan atau program penanganan stunting.

Keterbatasan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga, fasilitas) merupakan variabel struktural utama yang memicu praktik coping birokrat garis depan. Lipsky (1980) menjelaskan kondisi kerja yang terbatas, berkonsekuensi terhadap penurunan kualitas program kebijakan. Realita di Kecamatan Mendo Barat, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor penghambat lapangan dalam proses penurunan dan pencegahan stunting yang menimbulkan praktik coping birokrat garis depan, karena penanganan stunting yang tidak diimbangi dengan pencegahan stunting. Hal ini membuat adanya paradoks antara predikat penghargaan penanganan stunting di Kabupaten Bangka dengan relevansi angka stunting yang tinggi di Kecamatan Mendo Barat beberapa tahun terakhir.

Diskresi petugas lapangan memediasi antara pedoman formal dan Tindakan operasional. Menurut Lipsky (Kholifah, 2013) bahwa pedoman formal atau target yang tidak realistis menimbulkan peluang terjadi diskresi, oleh karena itu hal ini dapat bersifat adaptif, jika digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, akan tetapi menjadi problematik jika di picu oleh tekanan kerja, kurangnya pengawasan, dan kurangnya dukungan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga menelusuri bagaimana petugas lapangan di Mendo Barat menjalankan program, apakah adanya kegiatan memicu diskresi.

Mekanisme coping menjadi salah satu variabel dari teori *Street-Level Bureaucracy* oleh Michael Lipsky yang menghubungkan antara keterbatasan sumber daya, diskresi dengan outcome. Menurut Lipsky (1980) dalam (Kholifah, 2013) mendefinisikan coping adalah salah satu terobosan yang dilakukan birokrat garis depan (*Street-Level Bureaucracy*) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, beban tugas yang tinggi dan tuntutan beragam dari masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam implementasi, jika praktik di dominasi oleh coping akan berkonsekuensi pada turunnya kualitas suatu layanan.

Kemudian Masyarakat menjadi salah satu variabel dalam teori ini, partisipasi Masyarakat dan juga profesional petugas juga menjadi kunci untuk mengurangi atau memperbesar dampak dari coping. Menurut lipky bahwa partisipasi masyarakat harus dilibatkan dan juga petugas di latih agar lebih profesional dalam pelayanan di lapangan, supaya bisa mempertanggungjawab dan responsif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat studi kasus. Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan. Menurut (Yin, 2018) studi kasus secara sederhana adalah penelitian yang dilakukan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau peristiwa tertentu. untuk mengetahui paradoks lonjakan stunting di Kecamatan Mendo Barat, data sekunder (tren stunting 2020 –2024 dan indikator sumber daya) digunakan sebagai bahan awal, sedangkan kajian utama dilakukan melalui studi kasus lapangan yang mendalam. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* meliputi Bappeda Kabupaten Bangka, BKKBN Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat, Pemerintah Desa Mendo, Kemuje, Penagan, petugas gizi, kader posyandu, Kader Pembangun Manusia dan keluarga penerima layanan. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi (laporan, jurnal, data administrasi) serta artikel berita dan observasi kunjungan rumah, wawancara mendalam secara serta dokumentasi lapangan. Instrumen utama berupa panduan wawancara. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Persoalan stunting di Indonesia, pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk mempercepat penurunan stunting dengan menetapkan kebijakan Peraturan Presiden (PERPRES) No 72 Tahun 2021 sebagai landasan hukum terkait penurunan angka stunting di Indonesia. Kemudian Peraturan tersebut juga menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu pembangunan berkelanjutan, agar mengurangi serta menghilangkan semua bentuk kelaparan, bentuk malnutrisi dan meningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2030 melalui penguraian jumlah angka stunting (Novianti, 2022) serta Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting difokuskan pada peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan gizi, perbaikan pola pengasuhan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020).

Penyebab Tingginya Angka Stunting di Kecamatan Mendo Barat

Di Lihat di Tahun 2023 bahwa Kabupaten Bangka kembali menjadi penyumbang tertinggi stunting di antara ke 6 Kabupaten (wowbabel, 2024). Kemudian di lihat dari data tahun 2023, per Agustus menunjukkan ada 9 desa dengan angka stunting tertinggi di Kabupaten Bangka, yang menariknya ke 7 desa tersebut berasal dari Kecamatan Mendo Barat menjadi lokus stunting di Tahun 2024, data per 2024 terdapat 5 desa yang menjadi lokus stunting tahun 2025 di Kabupaten Bangka juga berasal dari Kecamatan Mendo Barat. Berikut di tuangkan dalam tabel 1 di bawah ini,

Tabel 1. Data Stunting Tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kecamatan Mendo Barat

Tahun 2023	Tahun 2024
Mendo	Mendo
Penagan	Penagan
Kemuja	Kemuja
Kota Kapur	Kota Kapur
Labuh Air Pandan	Labuh Air Pandan
Petaling Banjar	-
Paya Benua	-

(Sumber : Kecamatan Mendo Barat, 2025)

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, menariknya Kecamatan Mendo Barat sudah berulang kali menjadi lokus penanganan stunting, sejak 2014 sampai 2024. Kemudian dari data tabel 1 dan analisis lapangan bahwa di Kabupaten Bangka, desa lokasi utama penanganan stunting dominan berada di Kecamatan Mendo Barat. Dari data table 1, terdapat 3 desa dengan lokasi utama stunting berulang yaitu Desa Mendo, Penagan dan Desa Kemuja. Kabupaten Bangka di tahun 2023 menjadi penyumbang tertinggi angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang signifikan pada 2022 angka stunting di Provinsi sebesar 18,5% dan di Tahun 2023 menjadi 20,6%. Kecamatan Mendo Barat menjadi wilayah stunting tertinggi hampir tiap tahunnya di Kabupaten Bangka. Data dari Dinas P2KBP3A menunjukkan bahwa dua Puskesmas di Kecamatan Mendo Barat yaitu Puskesmas Penagan dan Puskesmas Petaling yaitu sebesar 33 anak dan 82 anak di tahun 2023 yang mengalami stunting. Kemudian di wilayah kerja Puskesmas Petaling, terdapat dua Desa yang angka stunting tertinggi yaitu Desa Kemuja dan Desa Mendo, selanjutnya di Kawasan kerja Puskesmas Penagan menunjukkan bahwa Desa Penagan menjadi penyumbang angka stunting tertinggi. Di Tahun 2023 ketiga desa tersebut merupakan desa tertinggi sekaligus desa lokus stunting.

Fenomena yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa terjadinya berulang sebagai lokasi stunting di Kecamatan Mendo Barat di lihat dari data angka stunting tahun 2023 dan Tahun 2024 menunjukkan bahwa Desa di wilayah Kecamatan Mendo Barat terus berulang menjadi lokus stunting tiap tahunnya. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi terus menerus, hal ini bukan hanya disebabkan oleh faktor gizi, gen, dan perilaku masyarakat. Akan tetapi juga berkaitan dengan dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Di satu sisi, Kabupaten Bangka, berhasil mendapatkan penghargaan berulang kali, sejak tahun 2020 – 2023 sebagai penanganan stunting terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian Kabupaten Bangka sendiri pernah menjadi salah satu *Best Practice* pengelolaan Stunting nasional pada tahun 2021 dan *Best practice* pengelolaan stunting tahun 2019 versi Setwapres (Ahli gizi). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan yang dicapai pemerintah, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat, belum sepenuhnya berjalan seiring. Kesenjangan pencapaian administratif dan implementasi lapangan berkonsekuensi pada hambatan dalam mengupayakan penurunan stunting, terkhususnya di Kecamatan Mendo Barat agar keluar dari zona lokus stunting. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa keberhasilan yang dicapai Kabupaten Bangka, tidak berbanding lurus dengan keberhasilan substantif di tingkat lokal. Permasalahan tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebijakan di level Kabupaten dengan praktik di lapangan.

Hasil lapangan di Kecamatan Mendo Barat terkait tingginya angka stunting di wilayahnya, disebabkan oleh beberapa faktor determinan penyebab stunting, dari hasil analisis E-PPGBM bahwa terdapat 7 faktor penyebab stunting, antara lain:

1. terlalu fokus pada penanganan stunting
2. Pengawasan yang belum cukup optimal
3. penyakit bawaan,
4. kekurangan gizi,
5. kekurangan energi kronis pada ibu hamil,
6. Anemia pada perempuan remaja
7. Pola kehidupan seperti pola perilaku, adat piring baik ibu maupun anak,
8. terbatasnya administrasi negara seperti keluarga yang tidak memiliki akte kependudukan dan BPJS.

Kemudian, dilihat dari landasan hukum yang berpaku pada kerangka Peraturan Bupati (PERBUP) No. 56 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang percepatan penurunan stunting, seharusnya menekankan pada kemandirian keluarga yang dijelaskan pada pasal 6, selanjutnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang di jelaskan pada pasal 7 dan juga Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dijelaskan pada pasal 8, ketiga point ini menjadi strategi utama dalam penurunan stunting di Kabupaten Bangka. Akan tetapi hasil lapangan menunjukkan, proses jalannya kebijakan tersebut, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan isi dari peraturan tersebut, masih banyak kekeliruan yang terjadi hingga menimbulkan banyak hambatan-hambatan dalam proses penurunan stunting. Pemerintah dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat bukan semata-mata penerima program saja, akan tetapi sebagai subjek yang ikut terlibat dalam permasalahan stunting atau penurunan stunting terkhususnya di Kecamatan Mendo Barat. Nyatanya di Kecamatan Mendo Barat dalam wawancara kepada salah satu pegawai BBKN Kecamatan Mendo Barat yaitu Ari yang menjelaskan bahwa permasalahan stunting di Kecamatan Mendo Barat tidak selesai-selesai, sudah sejak beberapa tahun kecamatan ini berada di zona merah stunting hingga perhari ini.

Walaupun program-program penurunan stunting terus-menerus di gempur, hingga melalui salah satu program yang didesain untuk penurunan stunting yaitu *One Stop Service* Penuntasan stunting, yang melibatkan berbagai pihak untuk terlibat dalam penuntasan stunting di Kabupaten Bangka. Kecamatan Mendo Barat menjadi fokus utama dalam hal ini, dikarenakan beberapa tahun terakhir, wilayah ini menjadi lokus stunting. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa program ini menjadi salah satu inovasi untuk menurunkan angka stunting dengan memperhatikan secara khusus anak-anak stunting. Berbagai program yang di implementasi pada program ini seperti sosialisasi, edukasi Kesehatan, Pemberian makanan tambahan dan juga mendatangkan langsung ahli gizi, psikolog dan dokter anak ikut terlibat dalam proses layanan satu pintu seperti melalui “Posyandu”. Penanganan penurunan stunting di Kabupaten Bangka sudah dilakukan melalui berbagai macam program yang melibatkan berbagai kalangan remaja hingga orang tua, bukan hanya berfokus pada perempuan saja melainkan melibatkan laki- laki. Berbagai program sudah dilakukan dari pemberian gizi, pola asuh hingga pendampingan anak-anak stunting dan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Kemudian kolaborasi lintas sektor sudah dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menangani penurunan stunting Berbagai program sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, genjotan-genjotan terus menurun dilakukan, akan tetapi disayangkannya bahwa program tersebut belum sejalan dengan masyarakat, dari hasil wawancara di Kecamatan Mendo Barat program yang dirancang dengan baik, pada saat implementasi berbeda, karena perspektif antara petugas lapangan yang berbeda hingga berkonsekuensi pada hasil yang berbeda. Menurut salah satu informan BKKBN Ari,

“Program yang dijalankan tiap petugas lapangan pasti berbeda, di Kecamatan Mendo Barat ada beberapa wilayah yang berhasil menafsirkan program dari pemerintah atas salah satunya Desa Zed, dalam program pembagian susu yang dilakukan secara bertahap dan pendampingan berat badan tiap minggunya. Jadi saat ini Desa Zed berhasil menjadi desa Zero stunting. Akan tapi beberapa Desa yang langsung membagikan susunya secara sekaligus tanpa adanya pendampingan lebih lanjut”.

Kemudian yang terpenting juga peran masyarakatnya, dalam PERBUP No 56 Tahun 2022, yang menargetkan masyarakat bukan hanya sekedar penerima program melainkan juga aktor dalam penurunan stunting. Dari hasil lapangan bahwa nyatanya peran masyarakat masih kurang, di sini masyarakat hanya berperan sebagai peserta saja, dalam artian datang setiap adanya program, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya di terapkan di kehidupan sehari-harinya. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Mendo menjelaskan bahwa di saat anaknya di fase GTM (Gerakan Tutup Mulut) yang membuat saya selaku orang tua susah memberikan makan dan hanya memberikan pada saat anak saya mau makan saja. Dari pernyataan tersebut, bahwa kesadaran masyarakat masih minim walaupun sudah dilakukan beberapa kali dilakukan edukasi. Dengan demikian bahwa hal ini belum sejalan dengan apa yang di targetkan pemerintah. Kemudian dari pernyataan salah satu perwakilan Bappeda Kabupaten Bangka yang menyebutkan,

“Negara sudah sepenuhnya ikut serta dalam permasalahan stunting hingga bertanggung jawab atas persoalan anak-anak stunting, akan tetapi kesadaran masyarakat yang masih kurang dan tidak melek terhadap dampak stunting bagi anak- anak menjadi tantangan yang cukup besar.”

Berdasarkan hal tersebut, yang terjadi di Desa Mendo, Penagan dan Kemuja, menggambarkan terjadinya siklus berulang berada di zona lokus stunting hampir tiap tahunnya. Keberhasilan yang didapatkan Kabupaten Bangka belum sebanding dengan apa yang terjadi di Ketiga Desa tersebut. Ketiga Desa ini, masih terus berada di zona merah stunting, walaupun penurunan stunting terus- terusan dilaksanakan. Hingga ketiga pemerintah tersebut juga merasa bahwa permasalahan stunting sulit di berantaskan, hambatan satu persatu terus muncul mulai dari implementasi kebijakan, petugas lapangan hingga masyarakat sendiri. Hasil wawancara dari ketiga Pelayanan Kasih dari Desa Mendo, Penagan dan Kemuja menyebutkan, tenaga kerja penanganan stunting sudah melakukan sebisa mungkin, akan tetapi permasalahan stunting ini selalu terjadi, terlebih lagi di Ketiga desa menjadi lokus stunting di Kecamatan Mendo Barat sudah sejak lama.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah

Paradoks antara keberhasilan yang di capai Kabupaten Bangka dengan kondisi nyata di Kecamatan Mendo Barat di jelaskan menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* (SLB) oleh Michael Lipsky (1980). Teori ini berbicara bahwa birokrat garis depan atau petugas lapangan seperti petugas gizi, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan aparatur pemerintah desa yang berperan penting dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Dalam hal tersebut, birokrasi lapangan tersebut tidak hanya pelaksanaan teknis, akan tetapi juga sebagai aktor yang menentukan arah jalan kebijakan. Kemudian dalam teori *Street-Level Bureaucracy* (SLB) Michael Lipsky (1980) yang berbicara tentang peran birokrat garis depan, kebijakan publik dasarnya dibentuk dan terbentuk oleh aktor lapangan atau petugas lapangan. Menurut lipsky bahwa kesenjangan ini terjadi dikarenakan birokrat garis depan atau petugas lapangan dalam menjalankan program memiliki perbedaan penafsiran hingga memodifikasinya agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan sumber dayanya. Oleh karena itu keberhasilan program di lapangan tergantung pada kapasitas dan inisiatif petugas lapangan, tidak hanya semata-mata peraturan. Hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini, menggunakan teori *Street-Level Bureaucracy* (SLB) Michael Lipsky (1980) terdapat 4 variabel, antara lain Keterbatasan sumber daya, Diskresi petugas lapangan, mekanisme coping dan terakhir partisipasi masyarakat.

Pertama, Keterbatasan sumber daya merupakan permasalahan awal dalam implementasi kebijakan di lapangan. Hasil penelitian di Kecamatan Mendo Barat, bahwa proses implementasi percepatan penurunan stunting mengalami berbagai keterbatasan baik fasilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Banyaknya lokus stunting di Kecamatan Mendo Barat, dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan data per tahun 2023 terdapat 7 Desa yang menjadi lokus

stunting di Kecamatan Mendo Barat hingga target penurunan yang tinggi untuk mencapai target aman angka stunting standar nasional yaitu sebesar 21,5% di tahun 2023 dan ditahun 2024 sebesar 19,8%. Kemudian target yang cukup tinggi di tingkat Kabupaten Bangka di tahun 2024 menjadi 14%. Beban kerja yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya baik fasilitas dan SDM berdampak pada program yang sifatnya bertahan atau jangka pendek.

Di satu sisi, keterbatasan sumber daya juga membuat Kabupaten Bangka berfokus bagaimana penurunan angka stunting. Salah satu pemerintah level atas yang bertugas menjadi mengkoordinasi menjelaskan bagaimana program – program yang di implementasikan yaitu Bappeda Kabupaten Bangka, uniknya kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan di nilai salah langkah, koordinasi yang dilakukan kabupaten Bangka menjelaskan berfokus pada penurunan stunting akibat keterbatasan sumber daya baik fasilitas, pendanaan dan juga sumber daya manusia. Akibat dari terlalu fokus ke penurunan stunting tanpa di imbangi pencegahan stunting yang dinilai pasif berdampak pada peningkatan stunting pada anak- anak pra stunting. Oleh karena itu dalam kajian ini menimbulkan bentuk ketidakseimbangan antara penghargaan yang didapatkan dengan kondisi lapangan di Kecamatan Mendo Barat, paradoks yang muncul di akibatkan tiap tahunnya sejak 2019 hingga saat ini, menjadi kawasan zona merah stunting, rata-rata lokus stunting berasal dari Kecamatan Mendo Barat, terutama Desa Mendo, Penagan dan Kemuja.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya memicu jalannya program yang lebih bervariasi, dengan hal ini, terjadi persoalan ini bukan hanya dilihat dari segi pemerintah melainkan juga dilihat dari sisi masyarakat. Paradoks ini muncul bukan semata karena pemerintah melainkan juga di ranah masyarakat, penurunan yang dilakukan pemerintah melalui program-program yang sudah dipersiapkan dengan matang, hingga ditahap implementasi memunculkan beragam inovasi baru akibat salah penafsiran oleh petugas lapangan serta kondisi lapangan yang tidak memungkinkan.

Kedua, Diskresi petugas lapangan. Artinya petugas lapangan atau birokrat garis depan memiliki kebebasan dalam mengartikan dan implementasi kebijakan publik berdasarkan dengan kondisi di lapangan. Diskresi terjadi karena keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian di Kecamatan Mendo Barat, proses implementasi kebijakan yang di tinjau dalam PERBUP No. 56 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting. Di lihat dalam Pasal 6 – 8 Menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar penurunan angka stunting saja, melainkan juga masyarakat terlibat aktif dan aktor perubahan. Petugas lapangan di targetkan bukan hanya sekedar penurunan stunting, akan tetapi juga harus bisa mengubah pola laku untuk membangun kemandirian keluarga, GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dan Gerakan 1.000 hari kehidupan pertama (HKP).

Kondisi lapangan di Kecamatan Mendo Barat, petugas lapangan memiliki kebebasan dalam mengartikan kebijakan dengan kondisinya. Kecamatan Mendo Barat yang terus-terusan menjadi lokasi stunting di Kabupaten Bangka, oleh karena itu gempuran program-program stunting difokuskan ke kawasan Kecamatan Mendo Barat. Implementasi yang dilakukan petugas lapangan dominan berfokus pada penurunan, tanpa di imbangi pencegahan. Program-program yang dijalankan petugas lapangan di Kecamatan Mendo Barat dalam implementasi menafsirkan program lebih pragmatis akibat dari keterbatasan sumber daya. Program-program yang dijalankan sering kali hanya menjadi masyarakat sebagai peserta seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Sosialisasi, pemberian bahan pokok dan lain-lain. Buktinya terjadinya salah penafsiran mengenai program yang disalurkan dari pihak pemerintah level atas. Perbedaan implementasi kebijakan oleh petugas lapangan yang membuat program berjalan tidak efektif, di Kecamatan Mendo Barat Desa Zed berhasil menjadi Desa Zero stunting, salah satu keberhasilannya mengelola program pemberian susu dengan melakukan pendampingan yang masif, sedangkan beberapa Desa di Kecamatan Mendo Barat memberikan

susu sekaligus tanpa pendampingan yang masif yang mengakibatkan program berjalan satu arah tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini menimbulkan perilaku negatif. Hasil wawancara, Menurut Ari selaku BKKBN Kecamatan Mendo Barat mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program pemberian susu, di beberapa desa yang dinilai belum optimal dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat sehingga masyarakat menyalahgunakan pemberian tersebut dengan diperjual-belikan. Dan juga Diskresi petugas lapangan ini juga memicu terjadinya pemecahan keuangan. Dibuktikan hasil wawancara bersama Pelayanan Kasih Desa Penagan yaitu Ali, yang menyebutkan bahwa Pendanaan yang banyak dihabiskan dalam mendesain kebijakan atau pelaksanaan program saja seperti rapat di Hotel untuk merancang kegiatan atau program.

Selain itu, hasil obserasi dan wawancara ke 3 Desa dengan angka stunting tertinggi di Kecamatan Mendo Barat menunjukkan program-program yang dijalankan bersifat jangka pendek. Petugas lapangan Desa Mendo, Kemuja, dan Penagan sama halnya dalam implementasi jangka pendek, program yang dijalankan bersifat pragmatis. Program yang dijalankan belum menyentuh akar permasalahan penyebab stunting. Salah satu program rutin yang dijalankan di Desa lokus stunting yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) hanya sekedar memberikan makananan tanpa pengawasan langsung. Nyatanya program tersebut berjalan lancar akan tetapi belum dapat menyentuh akar stunting, paradoks yang muncul di akibatkan penanganan yang berhasil, akan tetapi pencegahan yang masih minim.

Ketiga Mekanisme Coping, kerangka kerja ini petugas lapangan menerjemahkan kondisi lapangan untuk melaksanakan program. Implementasi bisa diukur berbeda sesuai dengan kondisi lapangan. Mekansime coping adalah menjadi strategi bertahan atau strategi yang dapat dilakukan akibat dari keterbatasan dilapangan. Realita dilapangan menunjukkan bahwa praktik coping memang terjadi dilapangan dalam implementasi. Praktik coping yang dijalankan oleh petugas lapangan di Kecamatan Mendo Barat cenderung bersifat adaptif akan tetapi diwarnai juga dengan ketidakseimbangan dengan penurunan. Sebelum Tahun 2024, petugas lapangan hanya berfokus pada penanganan stunting saja, karena di tahun 2023 Kabupaten Bangka penyumbang tertinggi angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 23,2%, wilayah kecamatan Mendo Barat lokus stunting. Faktanya di Kecamatan Mendo Barat, keterbatasan dan target yang tinggi, terjadinya praktik mekansime coping dalam implementasi program akibat kondisi lapangan untuk tetap melaksanakan program walaupun dengan adanya perbedaan dengan landasan awal. Hasil data dilapangan bentuk mekansime coping yang dilakukan petugas lapangan atau dalam teori Lipsky Birokrat garis depan di Kecamatan Mendo Barat berfokus ke penurunan angka stunting. Dari wawancara bersama Bappeda Kabupaten Bangka yaitu Diah sebagai koordinator petugas lapangan stunting, bahwa terjadinya salah strategi yang hanya berfokus pada anak-anak stunting saja, tanpa adanya program yang dikhususnya untuk anak-anak pra stunting atau menuju stunting. Berdasarkan hal tersebut sebelum tahun 2024, program yang dirancang dan di implementasi hanya berfokus ke hilir saja, dengan demikian penanganan yang berhasil dapat menurunkan angka stunting, akan tetapi diwarnai juga dengan kenaikan stunting, contohnya di Kecamatan Mendo Barat. Buktinya penurunan yang stabil di Kabupaten Bangka belum seimbang dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang terus-terusan menjadi lokus stunting hampir tiap tahunnya. Oleh karena itu karena tingginya angka stunting di Kabupaten Bangka terkhususnya di Kecamatan Mendo Barat, keterbatasan dan target penurunan yang tinggi. Hal ini berkonsekuensi pada munculnya paradoks antara keberhasilan penurunan hingga beberapa kali mendapatkan penghargaan baik tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian semua program banyak di terapkan untuk keluarga stunting, ibu hamil, remaja perempuan tanpa melihat anak-anak Pra stunting atau hampir masuk zona stunting. Jadi, mekanisme coping ini cenderung bersifat jangka pendek, artinya program yang dilakukan

hanya bersifat hasil sementara, nyatanya dengan keberhasilan yang dilakukan dalam penurunan sudah sejalan dengan kebijakan, akan tetapi pada program pencegahan masih kurang pencegahan stunting sering dilakukan hanya berbasis sosialisasi, edukasi dan lain-lain. Nyatanya dilihat dari penyebab stunting salah satunya yaitu sanitasi air dan air bersih, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pemerintahan Desa Penagan. Oleh karena itu penyebab tersebut masih minim dilakukan. Kecamatan Mendo Barat menjadi salah satu dampak mekanisme coping yaitu berfokus ke anak-anak stunting, permasalahan ini dilakukan terus berulang dilakukan sampai di tahun 2023 yang berfokus pada penanganan saja. Mekanisme coping ini juga menimbulkan dampak positif yang membawa kabupaten Bangka mendapat predikat keberhasilan penurunan stunting di beberapa periode, dan pernah menjadi *Best Practice* pengelolaan Stunting nasional. Akan tetapi

Dari sisi negatifnya bahwa program bersifat struktur saja, dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan PERBUP No. 56 Tahun 2022.

Keempat Partisipasi Masyarakat, menurut lipky bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu aktor yang berperan dalam keberhasilan implementasi program dan juga sebagai penentu mengurangi dan memperbesar dampak dari coping. Hasil data di lapangan menunjukkan bahwa penurunan dan pencegahan stunting yang disalurkan beberapa program hanya berbasis satu arah, masyarakat dalam hal ini hanya sebagai peserta dari suatu kegiatan. Berbagai program yang dijalankan pemerintah hampir seluruh kegiatan hanya sekedar peserta tanpa adanya implementasi di kehidupan sehari-harinya. Pada PERBUP No. 56 Tahun 2022, dalam Pasal 6-8 menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar penerima program saja, melainkan juga aktor utama penurunan dan pencegahan stunting. Akan tetapi kondisi nyatanya bahwa masyarakat hanya sekedar penerima saja, semua program yang dijalankan pemerintah belum seutuhnya kesadaran masyarakat tercipta. Kemudian masyarakat belum seutuhnya melek terhadap permasalahan stunting. Isi dari Peraturan tersebut adalah membangun kemandirian keluarga, GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dan Gerakan 1.000 hari kehidupan pertama (HKP). Dari hal ini belum sepenuhnya di terapkan oleh masyarakat.

Menurut Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu Diah menjelaskan Bahwa pemerintah sudah sepenuhnya terlibat dalam permasalahan stunting, akan tetapi masyarakat belum sadar atas dampak stunting. Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Mendo bahwa, masyarakat yang menghadapi masalah GTM (Gerakan Tutup Mulut) pada anak akan tetapi tidak memiliki strategi pengasuhan yang tepat dan pendampingan pada anak. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa masih minimnya masyarakat yang menerapkan apa yang telah di sosialisasi, edukasi dan pelatihan oleh pemerintah atau petugas lapangan. Hal ini menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat terkait penanggulangan stunting, dari hasil wawancara pada petugas lapangan, dari Bappeda sampai level bawah yaitu petugas lapangan BKKBN Kecamatan Mendo Barat, puskesmas, pelayanan kasih, KPM, Kader posyandu, menjelaskan sudah berbagai program yang dilakukan dimulai sosialisasi, edukasi mulai dari remaja perempuan hingga orang tua, akan tetapi masyarakat dalam hal ini hanya sebagai peserta atau penerima bantuan saja, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam pencegahan stunting. Uniknya yang terjadi salah satu anak-anak terdampak stunting berasal dari kalangan pengurus petugas lapangan penanganan stunting yaitu Kader Posyandu.

Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi keluarga, permasalahan ekonomi dan juga faktor budaya, masih banyak masyarakat yang menilai stunting disebabkan oleh keturunan aw hingga menerima dan tanpa penanganan lebih karena persepsi bahwa hal tersebut di akibatkan oleh keturunan. Hal ini membuat partisipasi masyarakat yang dinilai pasif, partisipasi hanya sekedar peserta kegiatan saja. Kemandirian masyarakat tidak bisa sepenuhnya di bentuk pada program yang dijalankan petugas lapangan terkait stunting.

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini, permasalahan stunting di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara rekognisi penghargaan penurunan stunting baik lokal maupun nasional dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang menunjukkan terus menurun menjadi lokus stunting, dilihat pada tabel 1. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky (1980), hasil penelitian ini menunjukkan kesuksesan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh koordinator dan desain kebijakan saja, melainkan juga petugas lapangan berperan penting bagaimana jalannya kebijakan tersebut seperti tenaga puskesmas, ahli gizi, BKKBN, pelayanan kasih pemerintah Desa, kader posyandu, kader pembangunan manusia. Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, target kinerja dan partisipasi masyarakat sebagai aktor perubahan. Dengan keterbatasan tersebut bahwa berkonsekuensi pada munculnya praktik diskresi dan mekanisme coping yang membuat strategi yang dilakukan hanya bersifat jangka pendek atau berfokus pada penanganan stunting saja. Hal tersebut pada implementasi hanya berfokus pada anak-anak yang terdampak stunting tanpa melihat anak-anak pra stunting. Akibatnya banyak program yang dijalankan belum menyentuh akar permasalahan. Kemudian partisipasi masyarakat dalam teori lipsky juga menjadi salah satu kunci menentukan arah implementasi kebijakan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Kecamatan Mendo Barat hanya sekedar peserta bukan sebagai aktor pencegahan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan penelitian ini melalui program Kuliah Luar Kampus (2025) Universitas Bangka Belitung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan fasilitas dan Bapak Irvan Ansyari, S.IP.,M.Si atas bimbingan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

6. Daftar Pustaka

- Dinkes.bangka. (2023). *Pemerintah Kabupaten Bangka Kembali Meraih Penghargaan Terbaik dalam Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023*. Dinkes.Bangka. <https://dinkes.bangka.go.id/berita/pemerintah-kabupaten-bangka-kembali-meraih-penghargaan-terbaik-dalam-penilaian-kinerja-8-aksi-konvergensi-penurunan-stunting-tingkat-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-tahun-2023>
- Kemenkes. (2023). *Factsheets: Stunting di Indonesia dan Determinannya*. Visualisasi Data SKI 2023.
- Kholifah, E. (2013). Pemikiran Kritis tentang Bureaucrat Street Level Theory oleh Michael Lipsky. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 18., 120–148.
- Novianti, A. D. (2022). PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING OLEH PUSKESMAS REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (2020). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2021*. 1.

- Rania Esdy Prawita, Rendita Dwibarto, F. R. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENURUNAN STUNTING. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(6), 1333–1336. <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i6.4892>
- Rosanti, L. D. A. (2023). implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang). *Eprints Ipdn*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Wowbabel. (2024). *Prevalensi Stunting di Bangka Belitung Capai 20,6 Persen, Tertinggi di Kabupaten Bangka*. <https://doi.org/https://www.wowbabel.com/lokal/59813516643/prevalensi-stunting-di-bangka-belitung-capai-206-persen-tertinggi-di-kabupaten-bangka>
- Yanti, D. (2024). *Diseminasi Hasil Pengukuran dan Publikasi Data Stunting: Bentuk Aksi 7 Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2024*. KesmasId. <https://kesmas-id.com/diseminasi-hasil-pengukuran-dan-publikasi-data-stunting-bentuk-aksi-7-konvergensi-pencegahan-dan-penurunan-stunting-di-kabupaten-bangka-tahun-2024/>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications, Inc.